

***HIDDEN CURRICULUM* DALAM PENGAJARAN SEJARAH DAN PEMBENTUKAN JIWA NASIONALISME**

Dyah Kumalasari

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat kembali sejauh mana *hidden curriculum* dalam pengajaran sejarah dapat mempengaruhi terbentuknya jiwa nasionalisme di kalangan siswa / mahasiswa. Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai kondisi objektif, terutama berkaitan dengan etnis, agama, budaya, dan bahasa tampaknya memang sangat rentan dan potensial akan menjadi penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Konsep tentang *hidden curriculum* mencakup pengembangan nilai-nilai di sekolah yang perhatian dan penekanannya berbeda-beda sesuai tingkat semangat dosen dan kondisi fisik serta iklim sosial dari sekolah/kampus. Konsep *hidden curriculum* dalam pengajaran sejarah tersebut bertujuan membangun kembali ikatan kebangsaan (*rebuilding the nation*) yang merupakan problem *rebuilding the humanities, society, and culture*. Dalam hal ini peran serta orang tua maupun masyarakat dalam menumbuhkan sikap nasionalisme dalam konteks *hidden curriculum* sangat diperlukan.

A. Pendahuluan

Dalam strategi pelaksanaan pendidikan di sekolah terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan yaitu kurikulum, guru, dan pengajaran atau proses belajar.¹ Kurikulum merupakan *plan of learning*, program belajar bagi siswa sekaligus *intended learning out comes*, hasil belajar yang diniati.

Kurikulum semestinya mencakup tujuan, materi, strategi pelaksanaan, dan evaluasi. Sementara itu posisi guru sebagai salah satu komponen pendidikan, sangat sentral dalam keseluruhan sistem pendidikan, sebab guru bertugas

¹ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2000), P.1.

menterjemahkan dan mengembangkan nilai-nilai dari kurikulum untuk ditransformasikan kepada siswa melalui aktivitas belajar mengajar di kelas. Hal ini mengisyaratkan dan mempersyaratkan bahwa seorang guru harus senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan kurikulum, itu artinya guru harus selalu mau belajar. Sedangkan pengajaran atau mengajar menurut Burton dalam Nana Sudjana (1996)², sebagai elemen dasar dalam pendidikan pada hakekatnya adalah *the guidance of learning activities*, membimbing kegiatan siswa belajar yang nantinya pada diri siswa terjadi perubahan tingkah laku yang teraktualisasi dalam ranah kognitif (aspek intelektual), ranah psikomotor (keterampilan), dan ranah afektif (sikap).

Berkaitan dengan tujuan pengajaran, pada akhir-akhir ini muncul berbagai fenomena dan rasa kekhawatiran dari masyarakat tentang hasil pengajaran di lembaga pendidikan masih sebatas aspek intelektualitas dan *knowledge* (pengetahuan), belum mampu mewujudkan perubahan dan terbentuknya sikap seperti yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional maupun tujuan nasional, di antaranya adalah sikap kebangsaan (nasionalisme). Fenomena-fenomena seperti masih kuatnya primordialisme kesukuan, kedaerahan, munculnya konflik antar agama merupakan sederetan contoh yang sulit terbantahkan bahwa tujuan pendidikan untuk menumbuhkan sikap (aspek afektif) nasionalisme masih memerlukan proses yang cukup panjang.

Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai kondisi obyektif, terutama berkaitan dengan masalah etnis, agama, budaya, dan bahasa tampaknya

² Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1996).

memang sangat rentan dan potensial akan menjadi penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Mencermati berbagai fenomena dan kondisi obyektif bangsa yang serba majemuk, memang sangat penting untuk dipertanyakan kembali tentang bagaimana ikatan kesatuan dan semangat kebangsaan yang selama ini telah dibangun. Hal ini merupakan pertanyaan interpretatif terhadap munculnya berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang sangat dimungkinkan disebabkan oleh ikatan persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia sesungguhnya memang masih lemah. Sarana apa yang paling tepat untuk membangun landasan nasionalisme? Mengingat persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah membangun kembali kehidupan kebangsaan pada masa kini maupun masa yang akan datang, maka pendidikan menduduki tempat yang pokok sebagai sumber upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Persoalan pembangunan kembali ikatan kebangsaan (*rebuilding the nation*) adalah problem *rebuilding the humanities, society, and culture*. Dengan demikian ikatan nasionalisme tidak dapat dipisahkan dari ikatan negara, kemasyarakatan, dan kebudayaannya, sebab kebangsaan hakekatnya merupakan hasil proses pembudayaan dan pembelajaran (*learning process*) yang diupayakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara melalui sarana pendidikan yang dimilikinya.³ Di sinilah letak pentingnya *hidden curriculum* dalam pendidikan, serta peran orang tua maupun masyarakat dalam menumbuhkan sikap nasionalisme dalam konteks *hidden curriculum*.

³ Djoko Suryo, "Pendidikan Sebagai Upaya Membangun Sikap Kebangsaan Melalui Pluralitas Budaya Bangsa". *Makalah*. Disampaikan Dalam Seminar Perubahan Kurikulum Sejarah 25 Juli 2002 (Surakarta: UNS, 2002).

B. Pengajaran Sejarah

Sistem kegiatan pendidikan, adalah sistem kemasyarakatan yang kompleks, diletakkan sebagai suatu usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan diri.⁴ Dalam konteks yang lebih sederhana, pengajaran sejarah sebagai sub sistem dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan usaha pembandingan dalam kegiatan belajar, yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri. Di dalam pengajaran sejarah, masih banyak hal yang perlu dibenahi, seperti porsi pengajaran sejarah yang berasal dari ranah kognitif dan afektif. Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam pengajaran sejarah. Pengajaran sejarah yang mengutamakan fakta keras, kiranya perlu mendapat perhatian yang signifikan karena pengajaran sejarah yang demikian hanya akan menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik dan pada gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari sejarah.⁵ Masih diperlukan proses aktualisasi nilai-nilai sejarah dalam kehidupan yang nyata. Dengan kata lain, sejarah tidak akan berfungsi bagi proses pendidikan yang menjurus ke arah pertumbuhan dan pengembangan karakter bangsa apabila nilai-nilai sejarah tersebut belum terwujud dalam pola-pola perilaku yang nyata.

⁴ Bela H Banathy, *A Systems view of Education: Concepts and Principles for Effective Practice* (Englewood Cliffs: Educational Technology Publications, 1992), p. 175.

⁵ Soedjatmoko, *Kesadaran Sejarah dalam Pembangunan* (Jakarta: Prisma No.7, 1976), p. 15.

Secara umum pengajaran sejarah bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, dan menyadarkan peserta didik untuk mengenal diri dan lingkungannya, serta memberikan perspektif historikalitas. Sedangkan secara spesifik, tujuan pengajaran sejarah ada tiga yaitu, mengajarkan konsep, mengajarkan keterampilan intelektual, dan memberikan informasi kepada peserta didik.⁶ Dengan demikian, pengajaran sejarah tidak bertujuan untuk menghafal pelbagai peristiwa sejarah. Keterangan tentang kejadian dan peristiwa sejarah hanyalah merupakan suatu tujuan. Sudah barang tentu tujuan di sini dikaitkan dengan arah baru pendidikan modern, yaitu menjadikan peserta didik mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dirinya dan menyadari keberadaannya untuk ikut serta dalam menentukan masa depan yang lebih manusiawi bersama-sama dengan orang lain. Dengan kata lain adalah berupaya untuk menyadarkan peserta didik akan historikalisasi diri dan masyarakatnya.

Ahmad Syafii Maarif mengatakan bahwa, “pengajaran sejarah yang terlalu mengedepankan aspek kognitif, tidak akan banyak pengaruhnya dalam rangka memantapkan apa yang sering disebut sebagai jati diri dan kepribadian bangsa”.⁷ Lebih jauh diungkapkan pula bahwa pengajaran sejarah nasional yang antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kepribadian bangsa dan integritas nasional sebagai bagian dari tujuan pergerakan nasional yang dirumuskan secara padat dalam Sumpah Pemuda 1928, diperlukan pemilihan

⁶ Dennis Gunning, *The Teaching of History* (London: Cronhelm, 1978), p. 179-180.

⁷ A. Syafii Maarif, “Historiografi dan Pengajaran Sejarah”, *Makalah* (Padang: FPIPS IKIP Padang, 1995), p. 1.

strategi dan metode mengajar yang tepat. Aspek kognitif dan aspek moral perlu dianyam secara koherensi dan integratif, masing-masing saling menguatkan, tanpa mengorbankan watak ilmiahnya.⁸

C. Hidden Curriculum dan Nasionalisme

1. Hidden Curriculum

Oliver dalam Oliva menyamakan kurikulum dengan program pendidikan dan membagi menjadi empat bagian utama, yaitu:

“(1) the program of studies; (2) the program of experience; (3) the program of services; and (4) the hidden curriculum. The program of studies, experiences, and services are readily apparent. To these elements Oliver has added the concept of hidden curriculum, which encompasses values promoted by the school, differing emphases given by the different teachers within the same subject areas the degree of enthusiasme of teachers, and the physical and social elimate of the school”⁹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kurikulum pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat komponen pokok yaitu sebagai program pendidikan atau belajar, program pengalaman, program latihan, dan *hidden curriculum*. Menurut Oliver, program belajar pengalaman dan latihan dengan mudah, secara jelas dan nyata dapat kelihatan, sedangkan konsep tentang *hidden curriculum* mencakup pengembangan nilai-nilai di sekolah, perhatian, dan penekanan yang diberikan berbeda-beda pula terhadap bidang atau subyek yang sama, tingkat semangat guru-guru dan kondisi fisik dan iklim sosial dari sekolah.

⁸ Ibid, p. 5.

⁹ Peter F. Oliva, *Developing The Curriculum* (Boston: Little Brown Company, tt).

Hidden curriculum juga diartikan sebagai nilai-nilai siswa / mahasiswa yang sering diabaikan ketika kurikulum yang formal direncanakan.¹⁰ Namun demikian beberapa guru telah memfokuskan pada *hidden curriculum*, ruang kelas, dan sekolah yang informal, berubah dan dinamis yang mempengaruhi apa yang dipelajari. Bersama-sama dengan faktor yang lain (seperti kelas sosial, keluarga, kehidupan keluarga, kecerdasan, dan kepribadian), prestasi siswa dan tingkah lakunya, aturan sekolah juga sangat berpengaruh terhadap siswa. Interaksi sosial, kegiatan ekstrakurikuler, budaya di sekolah, aturan dan pengaturannya merupakan beberapa tipe dari *hidden curriculum*.

Pendapat lain mengenai *hidden curriculum*, bahwa konsep *hidden curriculum* ini diciptakan oleh Benson Snyder pada tahun 1971 dan digunakan oleh para pendidik, sosiolog, dan psikolog dalam melukiskan sistem informal dalam pendidikan.¹¹ *Hidden curriculum* juga disebutkan terdiri atas tiga R yang sangat penting untuk dikembangkan yaitu *rules* (aturan), *regulations* (peraturan), dan *routines* (kontinyu), di mana setiap sekolah yang menerapkan sistem ini harus beradaptasi. Sosialisasi nilai-nilai moral merupakan suplemen dari tiga R, pelajaran atau mata kuliah tersebut juga akan semakin jelas dan mudah dipahami bila disampaikan dengan jalan klasikal dalam ruang kelas yang teratur.

Dari beberapa pendapat tentang *hidden curriculum* di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah harus

¹⁰ Allan C. Ornstein & Levine U. Daniel, *An Introduction to the Foundations of Education* (Boston: Houghton Mifflin Company, tt).

¹¹ Jeane H. Balantine, *The Sociology of Education A Systematic Analysis* (New Jersey: Intence Hall Inc, 1983).

mendapatkan perhatian bukan hanya kurikulum yang tertulis dan direncanakan saja, tetapi ada satu komponen yang sebenarnya sangat penting dan semestinya harus mulai diperhatikan demi keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan meskipun tidak tertulis seperti berbagai peraturan lainnya yang dikembangkan di sekolah.

2. Nasionalisme

Menurut Toynbee dalam Marvin Perry, “*spirit which makes people feel and act and think about a part of any given society thought it were the whole of that society*”.¹² Nasionalisme dalam konteks tersebut dimaknai sebagai semangat yang dapat menumbuhkan dan membuat rakyat merasa dan bertindak serta berpikir tentang partisipasi apa yang dapat diberikan kepada masyarakat sehingga kepentingan masyarakat secara keseluruhan lebih didahulukan.

Nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa loyalitas tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.¹³ Jika dilihat nasionalisme dalam taraf pembentukannya, seperti pada pergerakan nasional, lebih terikat pada unsur-unsur subyektif seperti kesadaran kelompok (*group consciousness*), *we sentiment*, *corporate will*, dan bermacam-macam fakta mental lainnya. Pada tahap ini nasionalisme belum memasukkan unsur obyektif dari realitas historis konkret seperti negara, wilayah, bahasa, tradisi

¹² Marvin Perry, *Arnold Toynbee and the Crisis of the West* (University Press of America).

¹³ Hans Kohn, Terj. Sumantri Mertodipuro, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya* (Jakarta: Airlangga, 1984).

bersama dan lainnya, oleh karena itu nasionalisme dalam proses pembentukannya dianggap sebagai faktor sosio-psikologis.

Dalam pembahasan tentang nasionalisme erat sekali dengan patriotisme, yaitu semangat kecintaan kepada tanah air. Aktualisasi dari nasionalisme pada dasarnya merupakan refleksi dari semangat cinta tanah air. Bagaimana wujud kecintaan terhadap tanah air, tentunya masing-masing babagan waktu ada tuntutan yang berbeda-beda. Ketika tanah air Indonesia masih dijajah Kolonial Belanda, maka sebagai wujud cinta tanah air rakyat berjuang untuk membebaskan dari belenggu penjajah. Sementara itu pada masa sekarang, ketika bangsa ini telah merdeka namun dihadapkan dengan berbagai persoalan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang lain, tuntutan patriotisme dan rakyat sangat dinantikan dalam bentuk yang berbeda.

D. PENGAJARAN SEJARAH DALAM KONTEKS HIDDEN CURRICULUM MENUJU PEMBINAAN JIWA NASIONALISME

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Wujud dan bentuk tanggung jawab tersebut tidak sebatas pada masalah biaya, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kebersamaan dalam membina, mengarahkan, maupun menjalin interaksi yang serasi demi kepentingan pendidikan siswa. Salah satu masalah yang ditekankan dalam tujuan pendidikan nasional adalah terbinanya jiwa atau sikap nasionalisme (kebangsaan) di kalangan generasi muda.

Mencermati persoalan tersebut maka sudah sewajarnya apabila perhatian dicurahkan dalam rangka merealisasi tujuan pendidikan tersebut.

Sikap nasionalisme (*nationhood*) yang akan dituju dalam pendidikan nasionalisme, pada dasarnya telah dimiliki oleh masyarakat dan bangsa (*nation*) dan negara bangsa (*nation state*) yang diperoleh sehari-hari dari pendidikan di sekolah dan pengalaman pergaulan kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Konsep bangsa yang telah dimiliki masyarakat sampai saat ini pada dasarnya merupakan penerusan dari konsep bangsa menurut faham nasionalisme dari pendiri bangsa. Visi nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan orientasinya mewujudkan kemerdekaan sehingga ciri dan jiwa nasionalisme adalah anti kolonial. Setelah bangsa Indonesia mengalami kemajuan dalam pendidikan dan intelektualitas relevan dengan proses pembangunan maka visi nasionalisme menuntut perubahan paradigma dan sikap kebangsaan yang baru, artinya konsep nasionalisme pada masa kini perlu disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Dalam paradigma baru tentang nasionalisme dewasa ini harus diartikan sebagai bentuk orientasi pemikiran bangsa yang memberikan wawasan dan bimbingan bangsa untuk secara terus menerus mencapai kemajuan dan keberhasilan dalam berbagai bidang kebanggaan dan kehormatan bangsa. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu orientasi pemikiran yang dapat dipakai untuk mempertahankan serta menanggulangi segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi bangsa pada saat ini atau masa

yang akan datang. Dengan demikian sikap kebangsaan yang harus dibangun kembali pada saat ini perlu dilandasi dengan persepsi dan konsepsi nasionalisme baru dan juga pemahaman terhadap konsep ikatan bangsa itu sendiri yang berwawasan sosial, budaya, ekonomi, dan sains.¹⁴

Sejalan dengan konsep dari *hidden curriculum* yang dikemukakan oleh Oliver, Orstein, dan Levine yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai, maka pendidikan pada dasarnya tidak lepas dari pewarisan nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat kepada generasi penerus, termasuk di dalamnya jiwa nasionalisme. Semangat nasionalisme pada saat sekarang tidak lagi terletak pada pewarisan nilai dalam formulasi struktural, melainkan kesadaran sebagai anak bangsa sesuai tuntutan jamannya.¹⁵

Pengajaran sejarah di sekolah tidak dapat mengabaikan fungsi didaktis dari sejarah terutama untuk menopang pertumbuhan wawasan kebangsaan yang begitu fundamental bagi pembangunan negara. Proses belajar mengajar sebagai proses pemahaman dan penyadaran mampu menjadi sumber inspirasi dan pangkal tumbuhnya *sense of pride* (rasa kebangsaan) dan *sense of obligation* (rasa kewajiban). Di sini nasionalisme dapat dikembangkan di kalangan generasi muda yang tanpa idealisme dan aspirasi mengenai tanah air dan bangsanya hanya akan lari ke penghayatan hidupnya yang dangkal, materialistis, konsumeritis dengan semboyan untuk semata-mata

¹⁴ Djoko Suryo, Loc. Cit.

¹⁵ Ariel Haryanto, Ed. *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

mengumpulkan *fast and easy money* (mencari uang yang mudah dan cepat).¹⁶ Apabila generasi muda Indonesia berjiwa seperti itu, maka pertanyaannya adalah akan jadi apa Indonesia kita selanjutnya?

Hal yang mendasar untuk mendapat perhatian adalah proses dan tahap dimiliki, diresapi, dan diamalkannya suatu nilai (dalam hal ini jiwa nasionalisme) oleh seseorang tidak dapat dicapai melalui suatu proses sesaat, apalagi hanya melalui satu atau dua jam pelajaran, melainkan memerlukan suatu proses yang panjang dan terus menerus. Sebagai suatu ilustrasi dapat dicontohkan jika tujuan pengajaran sejarah hanya untuk dapat menerangkan arti peranan nilai nasionalisme, contoh tindakan nasionalistis, maka siswa yang cerdas dengan cepat akan dapat menjelaskan dan berkomentar tentang peranan sikap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan (nasionalisme), suatu generasi muda yang dihadapkan pada dua pilihan kepentingan bangsa atau warga pribadi lebih mementingkan kepentingan bangsa. Sebagai contoh seorang warga negara Indonesia mendapat tawaran menjadi pimpinan perusahaan keluarga di luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi, ternyata pilihan tetap di dalam negeri karena dilandasi oleh rasa nasionalisme yang tinggi dalam hal ini dalam memberi kontribusi bagi pembangunan bangsanya melalui keahlian yang dimiliki.

Kiranya cukup jelas bahwa pencapaian tingkat pendidikan sikap, afektif, nilai yang demikian tidak akan dapat terlaksana dengan jalan proses belajar mengajar biasa dengan mendasarkan kurikulum tertulis, yang tidak

¹⁶ Clifford Geertz, Terj. Fransisco Budi H, *Politik Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

lebih sekedar proses mentransfer informasi, pencapaian tersebut memerlukan proses pendidikan yang intensif dan terus menerus (*routin*).¹⁷

Peran serta sekolah dalam konteks *hidden curriculum* untuk mengembangkan sikap nasionalisme dapat dilakukan dengan pengembangan nilai, menciptakan iklim sosial yang kondusif melalui pola-pola interaksi sosial antara masyarakat, sekolah maupun guru, dan tidak kalah pentingnya adalah perhatian yang diberikan kepada para siswa / mahasiswa. Guru tidak sebatas mengajar, tetapi lebih jauh lagi adalah mendidik siswa, menanamkan sikap maupun nilai kebangsaan pada siswa. Apabila memungkinkan juga menyediakan waktu khusus untuk siswa di luar jam mengajar dalam rangka mengembangkan interaksi yang lebih positif demi keberhasilan penanaman sikap dan nilai. Implementasi dari semua itu dapat berupa mewujudkan sikap disiplin di lingkungan sekolah secara simultan baik unsur guru, siswa, maupun tenaga administrasi.

Sikap disiplin dalam konteks pembinaan nasionalisme dapat pula melalui kegiatan upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, maupun kegiatan lainnya. Semua kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan dan penanaman nilai, dan tetap berprinsip pada tiga R. *Rules* dalam artian sekolah harus membuat aturan main yang harus ditaati semua pihak, di mana aturan tersebut akan menumbuhkan sikap nasionalisme di kalangan siswa / mahasiswa, dalam hal ini tercermin pada tata tertib siswa. *Regulation*, dalam arti ada peraturan yang dibuat dan disepakati bersama yang

¹⁷ Soedijarto, Pengajaran Sejarah Sebagai Wahana Nilai dan Sikap, *Makalah*. Disampaikan dalam Simposium Pengajaran Sejarah di Jakarta, September 1998.

pada akhirnya akan mengikat semua komponen sekolah. *Routine*, kegiatan pengembangan nilai dan sikap harus dilakukan secara rutin, terus menerus, dievaluasi untuk bahan perbaikan dan kesempurnaan. Di sini peran orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan sekali, di samping membina, mengarahkan, memadukan pendidikan nilai kebangsaan kepada putra-putrinya. Orang tua, dan masyarakat dapat memberikan evaluasi dan masukan. Prinsip kerja sama dan saling membantu dalam pembinaan siswa inilah yang menjadi landasan penting bagi keberhasilan pembinaan nasionalisme di kalangan pelajar. Tentu saja bukan hal yang mudah, setidaknya akan dihadapkan pada kendala tingkat kesadaran orang tua yang heterogen serta tingkat pendidikan yang tidak sama, tentu merupakan persoalan tersendiri.

D. KESIMPULAN

Hidden curriculum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan, di luar kurikulum yang tertulis yang menyangkut pembangunan kembali ikatan kebangsaan (*rebuilding the nation*) dan problem *rebuilding the humanities, society, and culture*. Memang belum banyak yang menyoroti atau mengadakan kajian dan penelitian tentang kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) ini dalam kontribusinya bagi pencapaian tujuan pendidikan.

Ikatan nasionalisme tidak dapat dipisahkan dari ikatan negara, kemasyarakatan, dan kebudayaannya, sebab kebangsaan hakekatnya merupakan hasil proses pembudayaan dan pembelajaran (*learning process*)

yang diupayakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara melalui sarana pendidikan yang dimilikinya. Di sinilah letak pentingnya mengkaji dan menelaah tentang pentingnya *hidden curriculum* dalam pengajaran sejarah serta peran orang tua maupun masyarakat dalam menumbuhkan sikap nasionalisme.

Hidden curriculum yang menekankan pada *rules, regulation*, dan *routine* dalam implementasinya dapat berbentuk penanaman nilai, penciptaan iklim sosial yang kondusif, penyediaan sarana fisik ataupun pola interaksi yang dikembangkan oleh guru / dosen dalam pengajaran sejarah, sangat diperlukan guna mewujudkan sikap nasionalisme di kalangan siswa. Peran serta guru, orang tua, dan masyarakat dalam pelaksanaan *hidden curriculum* tersebut sangat penting demi pencapaian tujuan pengajaran sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariel Heryanto, Ed. (1996). *Nasionalisme Refleksi Krisis Kaum Ilmuwan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ballantine, H. Jeane. (1983). *The Sociology of Education A Systematic Analysis*. New Jersey: Intence Hall Inc.
- Banathy, Bella H. 1992. *A Systems View of Education: Concepts and Principles for Effective Practice*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Djoko Suryo. (2002). "Pendidikan Sebagai Upaya Membangun Sikap Kebangsaan Melalui Nilai-Nilai Pluralitas Budaya Bangsa". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Perubahan Kurikulum Sejarah 25 Juli 2002. Surakarta: UNS.
- Geertz, Clifford. Terj. Fransisco Budi Hardiman. (1994). *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunning, Dennis. 1978. *The Teaching of History*. London: Cronhelm.
- Kohn, Hans. Terj. Sumantri Mertodipuro. (1984). *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga.
- Nana Sudjana. (1996). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Oliva, Peter F. (tt). *Developing the Curriculum*. Boston: Little Brown Company.
- Ornstein, Allan C., & Levine U. Daniel. (tt). *An Introduction to The Foundations of Education*. Boston: Houhton Mifflin Company.
- Perry, Marvin. (tt). *Arnold Toynbee and The Crisis of The West*. America: University Press of America.
- Soedijarto. (1998). "Pengajaran Sejarah Sebagai Wahana Pendidikan Nilai dan Sikap". *Makalah*. Disampaikan dalam simposium Pengajaran Sejarah di Jakarta: September 1998.
- Soedjatmoko. 1976. "Kesadaran Sejarah dalam Pembangunan". *Prisma* No. 7. Jakarta.
- Syafii Maarif, Ahmad. (1995). "Historiografi dan Pengajaran Sejarah". *Makalah*. Padang: FPIPS IKIP Padang.